BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Peraturan Menteri No.1332/Menkes/SK/X/2002, yang menyatakan bahwa apotik adalah salah satu tempat tertentu, tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi dan perbekalan farmasi kepada masyarakat.

Peraturan perundang-undangan perapotikan di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan. Dimulai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) No.26 tahun 1965 tentang pengelolaan dan perizinan apotik, kemudian disempurnakan dalam Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1980, beserta petunjuk pelaksanaannya dalam Peraturan Menteri Kesehatan No.26 tahun 1981 dan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.178 tentang ketentuan dan tata cara pengelolaan apotik. Peraturan yang terakhir berlaku sampai sekarang adalah Keputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 yang memberikan beberapa keleluasaan kepada apotik untuk dapat meningkatkan derajat kesehatan yang optimal.

Usaha peningkatan pelayanan terhadap konsumen menuntut apotik bekerja keras dalam pengelolaannya. Idealnya sebuah apotik sudah tidak lagi memikirkan hitung-hitungan untuk sebuah kepuasan konsumen. Konsep ideal apotik adalah totalitas pelayanan terhadap konsumen/pasien. Kondisi pasien yang datang ke apotik merupakan kondisi yang tidak bisa ditunda oleh waktu dengan alasan jam kerja atau apapun. Pasien yang datang ke apotik untuk memenuhi hak asasinya untuk hidup dan

sehat. Tuntutan pasien lebih diutamakan dari urusan apapun sehingga pasien mendapatkan apa yang diinginkannya.

Beberapa apotik di Bandung bermasalah dalam segi administrasi, temuan pemeriksaan rutin Balai Besar Pengawasan Obat akan diserahkan kepada Dinas Kesehatan. Pemeriksaan rutin tersebut dilakukan setidaknya sebulan sekali, kemungkinan pengelolaan apotik-apotik tersebut akan berubah menjadi lebih baik. Namun, tidak tertutup kemungkinan mutu operasional apotik yang sudah baik justru menurun. Untuk itu, pemeriksaan berkala sangat penting untuk dilakukan. Pemeriksaan yang dilakukan misalnya berupa pengecekan kesesuaian faktur dengan jumlah obat. Bila tercatat jenis obat tertentu berjumlah 80 tablet, sementara kenyataannya ditemukan 100 tablet, ketidaksesuaian itu bisa dilaporkan. Pengecekkan faktur penting untuk memastikan orisinalitas serta pabrik asal obat tersebut. Contoh pelanggaran berat yang dilakukan pengelola apotik ialah menjual barang yang tidak berizin, misalnya obat-obatan China. Selain memeriksa administrasi, Balai Besar Pengawasan Obat juga memeriksa cara menyimpan obat-obatan. Cara penyimpanan yang salah bisa membuat obat rusak. Selain itu, kualitas obat akan turun dan ada kemungkinan timbul efek yang berbeda terhadap pasien.

Selain itu, apoteker harus dapat memeriksa resep yang dikeluarkan dengan benar. Bila jarang berada di tempat, kinerja apoteker itu perlu dicatat. Ada kalanya keberadaan apoteker hanya formalitas, datang sebulan sekali. Masalah lain adalah memperdagangkan obat keras yang tidak tercantum pada daftar obat yang dijual di apotik tersebut.

Sistem dokumentasi penjualan yang baik itu harus memiliki sistematika yang jelas, ringkas, dan sederhana. Mulai dari tahap pemasukan data, pengolahan dengan

prosedur yang ditentukan serta penyajian informasi yang akurat. Dalam membangun sistem dokumentasi penjualan, juga dibutuhkan sistem manajemen data yang efektif, sehingga data yang terkumpul dapat diolah, dieksplorasi secara optimal, aman dan terpercaya serta penghapusan pada saat yang tepat agar sistem dapat bekerja dengan maksimal tanpa terbebani oleh data yang kadaluarsa.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melakukan penelitian pada 10 apotik dengan memfokuskan pada pendokumentasian mengenai laporan keuangan di 10 apotik. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dan menyajikannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **"EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DOKUMEN SEBAGAI BAHAN BUKTI DALAM MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN PADA 10 APOTIK DI BANDUNG"**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengidentifikasikan pokok permasalahan yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan dokumen pada beberapa apotik di Bandung?
2. Sejauh mana peranan penggunaan dokumen sebagai bahan bukti laporan keuangan?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Tujuan penulis untuk melakukan penelitian di bidang sistem penjualan di beberapa apotik Bandung terutama yang berkaitan dengan efektivitas penggunaan dokumen sebagai bahan bukti dalam menyusun laporan keuangan adalah:

1. Mengetahui bagaimana penggunaan dokumen transaksi penjualan pada beberapa apotik di Bandung.
2. Mengetahui seberapa peranan penggunaan dokumen sebagai bahan bukti laporan keuangan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Manfaat-manfaat itu antara lain sebagai berikut:

1. Bagi 10 apotik di Bandung tempat penulis melakukan penelitian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukkan atau bahan pertimbangan mengenai efektivitas penggunaan dokumen sebagai bahan bukti dalam menyusun laporan keuangan.
2. Bagi pihak lain yang menaruh minat untuk mendalami bidang studi sistem informasi akuntansi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukkan atau bahan pertimbangan.
3. Bagi penulis sendiri, hasil penelitian ini merupakan bahan perbandingan antara teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan kenyataan yang ada dalam perusahaan sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai peranan dokumen dalam aktivitas penjualan, serta sebagai pemenuhan salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi Strata-1 di Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha Bandung.